



BKD | BADAN
KEPEGAWAIAN
DAERAH
Provinsi Kalimantan Tengah



LAPORAN TRIWULAN II

APRIL – JUNI 2024



KOMUNIKASI DAN
ADMINISTRASI PERSURATAN
/ PENYERAHAN BERKAS



KATA PENGANTAR

Pertama-tama puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas tersusunnya Laporan Kinerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Triwulan II Tahun Anggaran 2024.

Laporan Kinerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian visi dan misi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah selama Tahun Anggaran 2024. Penyusunan Laporan Kinerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026.

Penyusunan Laporan Triwulan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah merupakan bentuk kegiatan pemantauan perkembangan kinerja secara berkala yang bermanfaat dalam memberikan kepastian dan pengendalian pelaksanaan program yang sesuai dengan perencanaan tujuan dan sasaran yang tertuang dalam rencana strategis.

Pada dasarnya laporan triwulan memuat hasil dan capaian kontrak kinerja pada tahun anggaran berjalan yang terbagi menjadi 4 (empat) periode yakni triwulan I, II, III, IV dan kemudian akan disusun menjadi LKIP (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah). Sebagai penutup, segala hal yang termuat dalam laporan ini kiranya dapat memberi manfaat dalam pertimbangan dan keberlanjutan.

Palangka Raya, 01 Juli 2024
KEPAJABATAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH



LISDA AFRYANA, S.Sos
Pembina Utama Madya
NIP. 19620901 198911 2 005

A. Latar Belakang

Laporan Kinerja Triwulan II Tahun 2024 merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

B. Maksud dan Tujuan

Dengan disusunnya Laporan Kinerja Triwulan II Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 diharapkan dapat :

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh BKD Provinsi Kalimantan Tengah.
2. Mendorong BKD Provinsi Kalimantan Tengah di dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan;
3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi BKD Provinsi Kalimantan Tengah untuk meningkatkan kinerjanya;
4. Memberikan kepercayaan kepada ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah di dalam pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka memberikan pelayanan, pengelolaan, dan pembinaan di bidang kepegawaian.

C. Dasar Hukum

Dasar Hukum penyusunan Laporan Kinerja Triwulan II antara lain sebagai berikut :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
2. Peraturan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja.
3. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

D. Kedudukan, Tugas, Fungsi

Berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2022 tentang Satuan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah merupakan penyelenggara Manajemen Aparatur Sipil Negara dan Pengelola Kepegawaian Daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur Kalimantan Tengah melalui Sekretaris Daerah dengan tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kepegawaian.

E. Susunan Organisasi

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah terdiri atas beberapa fungsi yang memiliki tugas dan wewenangnya masing-masing sebagai berikut :

1. Sekretariat

Mempunyai tugas mengoordinasikan penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu dan tugas pelayanan administratif serta keuangan dan aset, kepegawaian, ketatausahaan, protokol, hubungan masyarakat dan rumah tangga, organisasi, tatalaksana serta dokumentasi peraturan perundang-undangan pada Badan Kepegawaian Daerah.

2. Bidang Pengolahan Data dan Pelayanan Informasi

Penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi, pelaksanaan, dan pengolahan data serta, analisis dan penyajian informasi Badan Kepegawaian Daerah.

3. Bidang Pengembangan

Menyajikan bahan pedoman pengembangan karir dan kompetensi ASN, menyusun formasi ASN dan melaksanakan seleksi pengadaan CASN, seleksi Praja IPDN, Seleksi Tugas Belajar dan Izin Belajar, Pengakuan dan pencantuman gelar, dan Mutasi Jabatan.

4. Bidang Mutasi

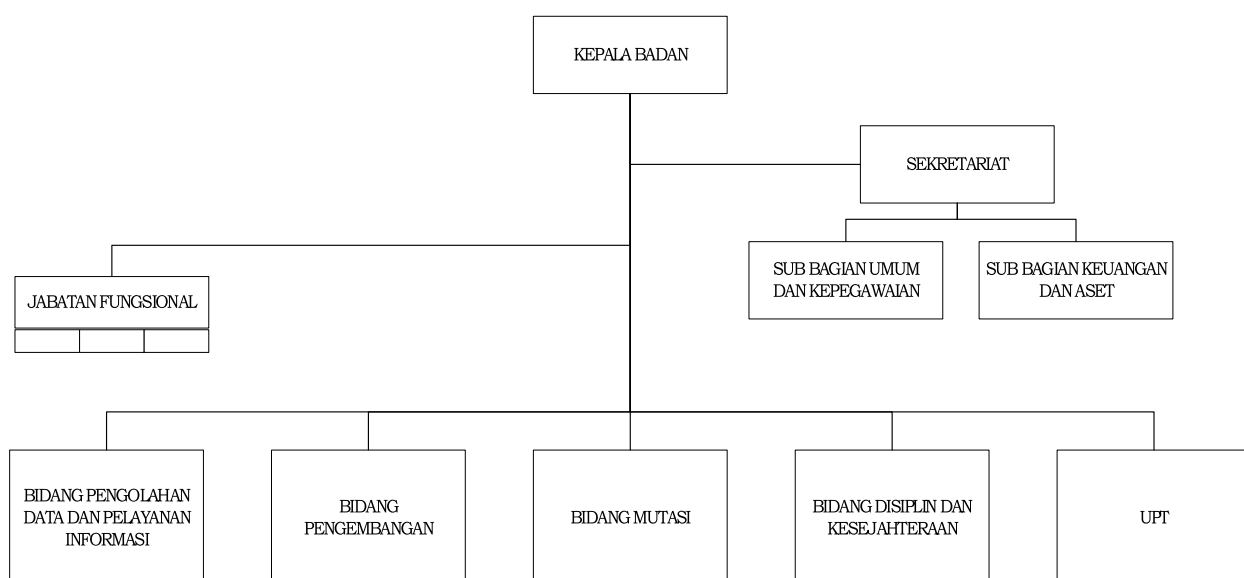
Merumuskan kebijakan, koordinasi, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan menyiapkan bahan dan memproses mutasi pindah ASN, mutasi kenaikan pangkat, sumpah janji, pengangkatan ASN dan pengusulan Kartu Pegawai, Peninjauan Masa Kerja ASN, ujian dinas tingkat I dan tingkat II, ujian penyesuaian ijazah, pemberhentian dan pensiun ASN Daerah.

5. Bidang Disiplin dan Kesejahteraan

Menyiapkan bahan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian untuk proses kedudukan hukum pegawai, pembinaan disiplin dan penyelesaian pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipil, melakukan pembinaan ASN melalui peningkatan kesejahteraan, pembinaan kebugaran jasmani, seni budaya serta pembinaan mental kerohanian ASN lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.

Untuk lebih jelas mengenai susunan struktur organisasi pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar 0-1 Struktur Organisasi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024



F. Aspek Strategis

Dalam rangka mendukung upaya pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dituntut untuk ikut berpartisipasi dalam pencapaian **Misi Ketiga** yaitu **Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik melalui Reformasi Birokrasi**. Dalam lingkup bidang kepegawaian, misi ini mengisyaratkan perlunya BKD selaku unsur penunjang urusan pemerintahan pada pelayanan kepegawaian untuk melakukan reformasi birokrasi pada bidang manajemen ASN.

Terkait dengan profesionalitas ASN, pelaksanaan sistem merit pada manajemen ASN Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah masih belum dapat terlaksana secara optimal. Selanjutnya, hirarki eselonisasi saat ini terdiri dari 5 level membuat proses pengambilan keputusan tidak efisien, sehingga perlu penyederhanaan eselonisasi serta perluasan jabatan fungsional dengan keahlian dan kompetensi yang semakin spesifik.

Dari sisi kompetensi, jumlah tenaga spesialis di lingkungan ASN masih kurang, serta rendahnya kompetensi dan tingkat pendidikan ASN. Dari sisi distribusi, persebaran ASN dengan keahlian tertentu/fungsional belum berbasiskan sektor unggulan kewilayahan. Dari sisi kesejahteraan, perlu terus diupayakan perbaikan sistem kesejahteraan ASN dan pensiunan ASN. Dari aspek regulasi, perlu percepatan penerbitan peraturan pelaksana UU No.5/2014 tentang ASN pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.

Penentuan isu-isu strategis mutlak menjadi bagian dalam suatu proses perencanaan. Keberhasilan mengidentifikasi isu-isu strategis dengan tepat pada gilirannya akan membuat perencanaan disusun menjadi tepat sasaran, efektif, dapat diterima oleh pihak-pihak terkait, dan dapat dipertanggungjawabkan.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis



Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah memiliki indikator kinerja yang akan dicapai dalam periode 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah. Berikut ini adalah indikator kinerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Persentase Kualitas Manajemen ASN Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah	-	80%	83%	85%	88%	90%	95%	95%
	Persentase Pegawai Perangkat Daerah dengan data kepegawaian yang terintegrasi dan up to date	-	85%	85,00%	90,00%	95,00%	100,00%	100,00%	100,00%

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Persentase Pegawai Sesuai dengan Kebutuhan Instansi	-	65%	70,00%	75,00%	80,00%	85,00%	90,00%	90,00%
	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	-	60%	65,00%	70,00%	75,00%	80,00%	85,00%	85,00%
	Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah	-	54	54	54	54	54	54	54
	Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah	-	1006	1006	1010	1013	1015	1017	1017
	Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah	-	5800	6000	6200	6400	6600	6800	6800
	Indeks Profesionalitas ASN pada Instansi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah	-	75,00	75,50	76,00	77,70	78,00	78,50	78,50
	Persentase Penurunan Pelanggaran Disiplin ASN	-	0	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%
	Persentase Usulan Pelayanan Kepegawaian yang ditindaklanjuti secara tepat waktu	-	80%	80,00%	85,00%	85,00%	90,00%	95,00%	95,00%
	Persentase ASN yang lulus dalam pengukuran kompetensi ASN	-	70,00%	70,00%	72,00%	72,00%	75,00%	75,00%	75,00%

Adapun formulasi masing-masing indikator kinerja utama pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dijabarkan pada tabel berikut :

*Tabel VII.1 Formulasi Indikator Kinerja Utama
Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah*

No.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET KINERJA	KETERANGAN	SUMBER DATA
1	2	3	4	5
1	Persentase Pegawai Perangkat Daerah dengan data kepegawaian yang terintegrasi dan up to date	Persentase	$\frac{\text{Jumlah pegawai perangkat daerah dengan data kepegawaian yang sudah terintegrasi, valid dan update}}{\text{Jumlah pegawai perangkat daerah secara keseluruhan}} \times 100\%$	SIMPEG Kalteng
2	Persentase Pegawai Sesuai dengan Kebutuhan Instansi	Persentase	$\frac{\text{Jumlah formasi jabatan yang sudah terisi}}{\text{Jumlah Kebutuhan Pegawai}} \times 100\%$	Dokumen Bezetting Formasi Instansi Pemprov Kalteng, Dokumen Laporan Kegiatan Seleksi CPNS, Dokumen Anjab ABK Pemprov Kalteng
3	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	Persentase	$\frac{\text{Jumlah ASN yang melanjutkan pendidikan Tugas Belajar dan Izin Belajar}}{\text{Jumlah Kebutuhan Tugas Belajar dan Izin Belajar Instansi}} \times 100\%$	Dokumen Laporan Monitoring dan Evaluasi Tugas Belajar dan Izin Belajar, Dokumen Rencana Kebutuhan Tugas Belajar dan Izin Belajar
4	Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah	Orang	Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi yang terisi pada Instansi Pemprov Kalteng	SIMPEG Kalteng
5	Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah	Orang	Jumlah Jabatan Administrasi yang terisi pada Instansi Pemprov Kalteng	SIMPEG Kalteng
6	Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah	Orang	Jumlah ASN yang telah diangkat dengan Jabatan Fungsional Tertentu pada Instansi Pemprov Kalteng	SIMPEG Kalteng
7	Indeks Profesionalitas ASN pada Instansi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah	Indeks	Skor yang didapatkan berdasarkan pada Peraturan BKN Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara	SAPKBKN

No.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET KINERJA	KETERANGAN	SUMBER DATA
1	2	3	4	5
8	Persentase Penurunan Pelanggaran Disiplin ASN	Persentase	$\left(\frac{\text{Jumlah Kasus Pelanggaran Disiplin pada tahun } (n - 1)}{\text{Jumlah Seluruh Pegawai pada tahun } (n - 1)} \times 100\% \right)$ <p style="text-align: center;">diturangi</p> $\left(\frac{\text{Jumlah Kasus Pelanggaran Disiplin pada tahun } (n)}{\text{Jumlah Seluruh Pegawai pada tahun } (n)} \times 100\% \right)$	Dokumen Laporan Tindak Lanjut Penanganan Kasus Pelanggaran Disiplin ASN
9	Persentase Usulan Pelayanan Kepegawaian yang ditindaklanjuti secara tepat waktu	Persentase	<p>Usulan Layanan Kepegawaian dimaksud meliputi: Tugas Belajar, Izin Belajar, Jabatan Fungsional, Kenaikan Pangkat, Mutasi, Pencantuman Gelar, Karis/Karsu, Usul Satyalencana Karya Satya, SKP Eselon II, Perbaikan/Update Data, Cuti, dan Pensiun (Layanan Kepegawaian dalam aplikasi TAGUHBKD)</p> $\frac{\text{Jumlah usulan layanan kepegawaian yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah semua usulan layanan kepegawaian yang masuk ke BKD dalam satu tahun}} \times 100\%$	Aplikasi SI TAGUHBKD
10	Persentase ASN yang lulus dalam pengukuran kompetensi ASN	Persentase	<p>Pengukuran Kompetensi ASN dimaksud meliputi Ujian Dinas Kenaikan Pangkat, Ujian Penyesuaian Ijazah, Asesmen Mutasi, serta Seleksi Terbuka JPT dan Job Fit</p> $\frac{\text{Jumlah ASN yang lulus}}{\text{Jumlah peserta keseluruhan}} \times 100\%$	Dokumen Laporan Kegiatan Pelaksanaan Ujian Dinas Kenaikan Pangkat, Ujian Penyesuaian Ijazah, Asesmen Mutasi, serta Seleksi Terbuka JPT dan Job Fit

B. Indikator Kinerja Utama dan Perjanjian Kinerja

Indikator Kinerja Utama merupakan suatu tolok ukur yang digunakan untuk membantu suatu organisasi menentukan dan mengukur kemajuan terhadap sasaran organisasi. Berdasarkan dokumen penetapan Indikator Kinerja Utama BKD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024, terdapat 1 (satu) sasaran strategis dan 10 (sepuluh) Indikator Kinerja Utama dengan rincian sebagai berikut :

PERJANJIAN KINERJA BKD TAHUN 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target
1	Meningkatnya Kualitas Manajemen ASN Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Pelayanan Kepegawaian yang Prima dan Profesional	Presentase Pegawai Perangkat Daerah dengan data kepegawaian yang terintegrasi dan up to date	Persentase	95%
		Presentase Pegawai Sesuai dengan Kebutuhan Instansi	Persentase	80%
		Presentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan pelatihan formal	Persentase	75%
		Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintahan	Orang	54
		Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintahan	Orang	1013
		Jumlah Pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintahan	Orang	6400
		Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	77.70
		Persentase Penurunan Pelanggaran Disiplin ASN	Persentase	0.10%
		Persentase Usulan Pelayanan Kepegawaian yang ditindaklanjuti secara tepat waktu	Persentase	85%
		Persentase ASN yang lulus dalam pengukuran kompetensi ASN	Persentase	72%
		Nilai SAKIP	Nilai	B-A (60-100)

BAB III CAPAIAN KINERJA TRIWULAN

A. Capaian Kinerja BKD

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah telah melaksanakan pengukuran kinerja atas kinerja yang diperjanjikan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dengan Bapak Gubernur Kalimantan Tengah tahun 2024.

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Capaian Triwulan II			Ket
					Target	Realisasi	Capaian (%)	
1	Meningkatnya Kualitas Manajemen ASN Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Pelayanan Kepegawaian yang Prima dan Profesional	Persentase Kualitas Manajemen ASN Provinsi Kalimantan Tengah						
		Persentase Pegawai Perangkat Daerah dengan data kepegawaian yang terintegrasi dan up to date	persentase	95%	95%	87%	91,58%	
		Persentase Pegawai Sesuai dengan Kebutuhan Instansi	persentase	80%	80%	61%	76,25%	
		Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	persentase	75%	75%	67%	89,33%	
		Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah	orang	54	54	48	88,89%	
		Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah	orang	1013	1013	3141	310,07%	
		Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah	orang	6400	6400	5888	92,00%	
		Indeks Profesionalitas ASN	indeks	77,7	77,7	53,59	68,97%	dalam proses penilaian pada BKN dan masih bisa meningkat nilainya
		Persentase penurunan Pelanggaran Disiplin ASN	persentase	0.10%	0.10%	0	0,00%	kegiatan terkait belum dilaksanakan
		Persentase usulan pelayanan kepegawaian yang ditindaklanjuti secara tepat waktu	persentase	85%	85%	0%	0,00%	kegiatan terkait belum dilaksanakan
		Persentase ASN yang lulus dalam pengukuran kompetensi ASN	persentase	72%	72%	0%	0,00%	kegiatan terkait belum dilaksanakan

B. Realisasi Keuangan BKD

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi Keuangan			Keterangan
					Target	Realisasi	Capaian (%)	
	BADAN DAERAH		KEPEGAWAIAN	42.605.928.423	4.740.554.770,00	6.326.423.590	133,45%	
1	PROGRAM URUSAN DAERAH		PENUNJANG PEMERINTAHAN PROVINSI	14.545.406.983	3.848.980.957	5.537.300.586	143,86%	
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	110.944.850	35.633.368	40.337.000	113,20%	
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	48.824.900	14.648.450	18.109.500	123,63%	
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	62.119.950	20.984.918	22.227.500	105,92%	
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.062.423.411	1.572.685.162	3.235.304.173	205,72%	
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.031.030.411	1.567.509.162	3.230.261.773	45,94%	
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	15.864.000	-	-	0,00%	

			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	15.529.000	5.176.000	5.042.400	32,47%	
			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	12.394.000	6.000.000	5.602.500	0,00%	
			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	12.394.000	6.000.000	5.602.500	45,20%	
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	210.486.000	106.378.115	104.128.000	97,88%	
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	145.000.000	96.378.115	104.128.000	108,04%	
			Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	55.486.000	-	-	0,00%	
			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10.000.000	10.000.000	-	0,00%	
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	3.792.999.682	1.468.297.352	1.143.898.233	77,91%	
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Peneran	29.900.000	8.970.000	14.508.000	161,74%	

			gan Bangunan Kantor					
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.703.366.298	1.205.172.087	834.247.500	69,22%	
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	77.981.384	23.394.415	34.221.400	146,28%	
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	981.752.000	230.760.850	260.921.333	113,07%	
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	128.000.000	58.500.000	9.325.000	7,29%	
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	128.000.000	58.500.000	9.325.000	7,29%	
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.647.645.472	456.563.400	705.571.443	154,54%	
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	379.167.600	97.118.400	163.475.443	168,33%	
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.268.477.872	359.445.000	542.096.000	150,81%	

		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.580.513.568	144.923.560	293.134.237	202,27%	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	275.000.000	72.488.100	16.454.000	22,70%	
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	32.500.000	6.052.500	9.900.000		
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.172.047.648	-	266.780.237	22,76%	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100.965.920	66.382.960	-	0,00%	
2		PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	28.060.521.440	891.573.813	789.123.004	88,51%	
		Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	25.416.225.940	399.061.325	379.455.466	95,09%	

			Koordinasi dan Fasilitas Pengadaan PNS dan PPPK	900.000.000	110.000.000	78.936.044	8,77%	
			Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	78.000.000	23.400.000	23.153.500	29,68%	
			Fasilitas Lembaga Profesi ASN	24.131.363.940	191.015.000	195.783.980	102,50%	
			Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	106.725.000	25.634.575	19.807.032		
			Pengelolaan Data Kepegawaian	200.137.000	49.011.750	61.774.910	126,04%	
			Mutasi dan Promosi ASN	1.727.136.500	326.642.415	313.542.270	95,99%	
			Pengelolaan Mutasi ASN	86.356.000	25.906.820	17.741.000	20,54%	
			Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	239.931.000	64.170.595	29.443.200	45,88%	
			Pengelolaan Promosi ASN	1.400.849.500	236.565.000	266.358.070	112,59%	
			Pengembangan Kompetensi ASN	143.000.000	26.570.500	23.437.008	16,39%	
			Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	45.000.000	14.846.000	8.776.500	19,50%	
			Pembinaan Jabatan Fungsional	98.000.000	11.724.500	14.660.508	14,96%	

			ASN					
			Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	774.159.000	139.299.573	72.688.260	52,18%	
			Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	84.959.000	13.402.500	15.020.700	17,68%	
			Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	664.200.000	117.897.073	50.437.560	42,78%	
			Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	25.000.000	8.000.000	7.230.000	90,38%	

Secara umum, pencapaian target kinerja pada Triwulan II pada tahun 2024 masih dalam proses pencapaian target. Selain itu telah dilakukan kegiatan inovatif dan kegiatan yang diperbaharui dalam pelayanan publik oleh Kepala BKD / PNS di jajaran Pemprov Kalteng.

Kerjasama antar unit dilingkungan internal Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah adalah salah satu kunci keberhasilan dalam menyelenggarakan kinerja yang optimal. Oleh karena itu, hal ini perlu menjadi nilai-nilai organisasi yang bertumbuh dan berkembang. Demikian Laporan Triwulan II ini disusun sebagai instrumen monitoring kinerja dan harapannya dapat dipergunakan dengan baik untuk evaluasi dan perbaikan kinerja pada periode-periode mendatang.